



LKJIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023**

**Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Buleleng
Tahun 2024**

Website: <http://damkar.bulelengkab.go.id> email: dinaspemadam.113@gmail.com

PANTANG PULANG SEBELUM PADAM

WALAUPUN NYAWA TARUHAN NYA

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Tahun 2023. LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Tahun 2023, merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Tahun 2023 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP .

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Singaraja, 29 Desember 2023.

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Buleleng



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Iktisar Esekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	4
1.5 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ...	6
1.6 Landasan Hukum	6
1.7 Sistematika Penyusunan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perencanaan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran	8
2.2 Visi dan Misi	9
2.3 Tujuan dan Saran	10
2.4 Strategi dan Kebijakan	16
2.5 Program Prioritas	17
2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
2.7 Perjanjian Kinerja (PK)	27
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Akuntanbilitas Keuangan	38
BAB IV PENUTUP	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kendaraan Roda empat.....	4
Tabel 1.2	Data Kendaraan Roda dua	5
Tabel 2.1	Sasaran Strategis jangka menengah	11
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	12
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Prioritas	18
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	21
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	27
Tabel 3.1	Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja.....	28
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	31
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	33
Tabel 3.4	Data Kasus/Kejadian Kebakaran Tahun 2017- 2023.....	35
Tabel 3.5	Data Operasi Darurat Non Kebakaran Tahun 2023	37
Tabel 3.6	Skala Nilai Peringkat Kinerja Tingkat Waktu Tanggap.....	38
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Tahun 2023	38
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2022	42

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Tahun 2023, secara bertahap bermaksud mewujudkan sistem penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran baik pada saat sebelum terjadi Bencana Kebakaran, saat terjadi Kebakaran dan Penyelamatan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, hal tersebut sesuai dengan *tujuan* Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng *Tahun 2023 yaitu: "Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat"*.

sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2023, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng telah melaksanakan 2 sasaran dan 2 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan anggaran keseluruhan Rp. 10.525.470.513,-
Anggaran tersebut terdiri dari:

- a. Program utama / prioritas / teknis yaitu 1 program, 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dalam DPA Perubahan jumlah anggaran Rp. 4.080.750.482,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.440.879.342,- (84.32%), tidak terealisasi sebesar Rp. 639.871.140,- (15.68%)
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.444.720.031,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.369.853.031,- (83.32%), tidak terealisasi sebesar Rp 1.074.867.000,- (16.68%)

Adapun dari pelaksanaan program dan kegiatan utama tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja terhadap 2 (dua) Sasaran Prioritas sbb:

NO	SASARAN	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran	94 %
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 %
	Rata -rata	90 %

Keberhasilan sasaran tersebut secara umum didukung oleh:

1. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2. Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat.
3. Menjamin mutu pelayanan dasar pemadam kebakaran dan non kebakaran.
4. Dukungan dari Kemendagri berupa Permendagri yang dikeluarkan guna mendukung dan menunjang tugas serta fungsi Dinas Pemadam Kebakaran.
5. Semakin banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk Dinas Pemadam Kebakaran

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Luasan wilayah Kabupaten Buleleng yang luas dan geografis Kabupaten Buleleng yang banyak terdapat daerah pegunungan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
3. Kurang memadainya gedung kantor dan fasilitas penunjang gedung kantor.
4. Kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
5. Belum maksimalnya anggaran yang didapatkan.
6. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan resiko bahaya kebakaran.

Langkah antisipatif yang perlu ditempuh demi kebaikan yaitu:

1. Meningkatkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya
2. Melakukan Pelatihan dan Bimtek Pasukan Pemadam agar memiliki kompetensi khusus dan meningkatkan profesionalisme
3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran awal

Singaraja, 29 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Buleleng



Putu Ariadi Pribadi, S.STP.M. AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19801212 199912 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah disebutkan bahwa kedudukan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng berada di bawah Pemerintah Kabupaten Buleleng dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pemadam Kebakaran sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023, sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebakaran, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris, membawahi :
 - a) Kepala Sub Bagian Umum
 - b) Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Kepala Bidang Pencegahan
 - a) Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi
 - b) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
3. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
 - a) Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data
 - b) Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
4. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - d) Kepala Sub Bagian Umum
3. Kepala Bidang Pencegahan
 - c) Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi
 - d) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
4. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
 - a) Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data
 - b) Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
5. Pos Pemadam Kebakaran
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng memiliki 3 Pos dan 6 Kepala Pos yang bertempat di Kantor-kantor Camat se-Kabupaten Buleleng yang terdiri dari :
 - a) Pos Buleleng I di Dinas
 - b) Pos Buleleng II di Seririt
 - c) Pos Buleleng III di Kubutambahan
 - d) Kepala Pos Tejakula di Kantor Camat Tejakula
 - e) Kepala Pos Sawan di Kantor Camat Sawan
 - f) Kepala Pos Sukasada di Kantor Camat Sukasada
 - g) Kepala Pos Banjar di Kantor Camat Banjar
 - h) Kepala Pos Busungbiu di Kantor Camat Busungbiu
 - i) Kepala Pos Gerokgak di Kantor Camat Gerokgak
6. Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng belum memiliki kelompok Jabatan fungsional yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan ketrampilan secara profesional.

1.4. SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung kegiatan operasional, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng didukung sejumlah sarana dan prasarana operasional yang terdiri dari Bangunan Dinas Pemadam Kebakaran, Pos I,II,dan III ; Kendaraan Operasional (Mobil Damkar) ; Kendaraan Pendukung Operasional (Sepeda motor) ; dan Peralatan Pendukung Operasional lainnya. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Data Kendaraan Operasional (Roda empat)

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Nama Barang	Unit Kerja	Tahun	Kondisi	No.Pol
1	Mobil Pemadam Kebakaran (Toyota)	Dinas	1968	Rusak Ringan	DK 8005 U
2	Mobil Pemadam Kebakaran (Isuzu)	Dinas	2006	Rusak Ringan	DK 8057 U
3	Mobil Pemadam Kebakaran (Isuzu Borneo)	Dinas	2004	Rusak Ringan	DK 8097 U
4	Mobil Pemadam Kebakaran (Isuzu Panther)	Dinas	2004	Rusak Ringan	DK 9057 U
5	Mobil Pemadam Kebakaran Mercedes	Pos Kubutambahan	1996	Rusak Ringan	DK 8004 U
6	Mobil Pemadam Kebakaran (Isuzu NKR71)	Pos Kubutambahan	2006	Rusak Ringan	DK 9614 U
7	Mobil Pemadam Kebakaran Mercedes	Pos Seririt	1996	Rusak Ringan	DK 8003 U
8	Mobil Pemadam Kebakaran (Isuzu Elf)	Pos Seririt	2006	Baik	DK 9066 U

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buleleng

Dilihat dari tabel diatas menggambarkan kendaraan operasional (Armada Damkar) sebagian besar sudah tua dan kurang optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan Petugas Pemadam Kebakaran menjangkau lokasi, disamping karena lokasinya sempit juga disebabkan letak geografis Kab.Buleleng .

Adapun faktor pendukung kinerja lainnya adalah :

a. Kendaraan Pendukung Operasional

Jumlah kendaraan pendukung operasional yang dimiliki Dinas

Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Data Kendaraan Operasional (Roda dua)
Dinas Pemadam Kebakaran 2023

No	Nama Barang	Unit Kerja	Tahun	Kondisi	No.Pol
1	Sepeda Motor Vario	Dinas	2006	Baik	DK 3529 U
2	Sepeda Motor Suzuki	Dinas	2006	Baik	DK 3530 U
3	Sepeda Motor Honda	Dinas	2006	Baik	DK 2956 U
4	Sepeda Motor Vario	Dinas	2009	Baik	DK 4186 U
5	Sepeda Motor Vario	Dinas	2017	Baik	DK 5792 U
6	Sepeda Motor Vario	Dinas	2017	Baik	DK 5796 U
7	Sepeda Motor Vario	Dinas	2017	Baik	DK 5794 U
8	Sepeda Motor Vario	Dinas	2017	Baik	DK 5793 U
9	Sepeda Motor Vario	Dinas	2017	Baik	DK 5795 U
10	Sepeda Motor Vario	Dinas	2017	Baik	DK 5791 U
11	Trail	Dinas	2017	Baik	DK 5567 U
12	Sepeda motor Mio M3 Cw	Dinas	2017	Baik	DK 6216 U
13	Sepeda Motor Yamaha/Soul GT	Pos Kubutambahan	2018	Baik	DK 6252 U
14	Sepeda Motor Yamaha/Soul GT	Pos Seririt	2018	Baik	DK 6254 U
15	Sepeda Motor Kawasaki/KLX	Dinas	2018	Baik	DK 6418 U
16	Honda CRV 150cc	Pos Kubutambahan	2023	Baru	DK 2750 U

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buleleng

Dilihat dari Tabel di atas Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2023 tidak ada pengadaan sepeda motor

b. Bangunan Gedung Kantor

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki Gedung Kantor yang kurang representatif sehingga tidak layak sebagai Gedung Perkantoran dan di perlukan Rehab Total, bangunan Gedung ini dapat di bagi menjadi 3 bagian :

1. Gedung Kantor (Dinas) : 1 Unit
2. Gedung Pos Kubutambahan : 1 Unit
3. Gedung Pos Seririt : 1 Unit

1.5. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah dari Renstra K/L dan Provinsi, maka masalah dan Isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Gangguan Informasi Komunikasi kejadian kebakaran ;
- c. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang;
- d. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB serta penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydrant, sungai dll untuk pemadaman;
- e. Pentingnya Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran;
- f. Pentingnya Kompensasi bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja.

1.6. LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi penjelasan Umum organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja organisasi, sasaran strategis organisasi sesuai dengan Pengukuran kinerja organisasi, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Sasaran Strategis, Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Buleleng dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng adalah :

***“BULELENG KERTA RAHARJA MENGANTARKAN BALI DWIPA JAYA
BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”***

Misi

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng merumuskan dari 3 (tiga) misi yang telah di susun RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran serta masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.

4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari Sustainable Development sistem Pemerintahan Kabupaten Buleleng, maka sudah menjadi kewajiban untuk mewujudkan apa yang menjadi Visi, Misi maupun Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam 3 (Tiga) tahun ke depan. Misi pembangunan yang menjadi focus untuk dijabarkan sesuai dengan Tupoksinya adalah pada Misi ke -3 ***“Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapka pelaksanaan otonomi daerah”***

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJPD dirumuskanlah Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng yaitu, dengan Visi : ***Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas akan dilakukan 4 (empat) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

1. Meningkatkan Peran serta kepedulian masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Bahaya Kebakaran
2. Membentuk Relawan Kebakaran (REDKAR) di setiap Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kabupaten Buleleng
3. Terwujudnya Waktu Tanggap Darurat (Response Time Rate)
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan 1. Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat 2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2023. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis jangka menengah

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi awal Tahun 2022	Tahun ke -			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran	%	85	94	94	94	94
Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	70	86%	86%	86%	86%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	Persentase Penanganan Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat (Trantibum linmas)	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang profesional	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen Pengkajian risiko pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran tepat waktu	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Aparatur pemadam kebakaran dan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam Dunia Masyarakat dan Dunia Usaha	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan penilaian sarana peralatan proteksi kebakaran
							Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah warga masyarakat dan dunia usaha yang mendapat sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah pembinaan relawan pemadam kebakaran dan penyelamatan

						Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang profesional
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat				Jumlah SK penyelamatan dan evakuasi	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Kabupaten/Kota
						Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
								Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah laporan layanan respon cepat (response time) operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia

						Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, identifikasi, verifikasi terkait pengaduan sarana dan prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangg ulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
								Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah peralatan pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan standarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
								Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangg ulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

								Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah pembangunan dan kerjasama pengembangan sistem komunikasi informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan daerah berbatasan kabupaten/kota
						Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran yang berdasarkan hasil investigasi	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah laporan verifikasi/validasi data dan laporan pasca kebakaran

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng

2.4. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Langkah yang akan ditempuh Dinas Pemadam Kebakaran untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buleleng adalah **Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat**. Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemadam Kebakaran agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran;
2. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK);
3. Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran tingkat dasar dan lanjutan;
4. Menambah armada dan sarana prasarana operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;

5. Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelamatan non kebakaran kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta.

2.5. Program Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam upaya menjalankan visi misi bupati dan wakil bupati dalam mencapai tujuan serta sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran, maka program-program utama periode lima tahun kedepan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen Pengkajian risiko pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran tepat waktu	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan penilaian sarana peralatan proteksi kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Aparatur pemadam kebakaran dan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam Dunia Masyarakat dan Dunia Usaha	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat dan dunia usaha yang mendapat sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah pembinaan relawan pemadam kebakaran dan penyelamatan
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang profesional
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SK penyelamatan dan evakuasi	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah laporan layanan respon cepat (response time) operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia

				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, identifikasi, verifikasi terkait pengaduan sarana dan prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan standarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia /Penyelamatan dan Evakuasi					
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Jumlah peralatan pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota		
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)					
Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran yang berdasarkan hasil investigasi	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah laporan verifikasi/validasi data dan laporan pasca kebakaran		

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng

2.6. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng 2022-2026 dengan mengambil target Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng selengkapnya tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagaimana berikut :

Tabel 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2023

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		Target	PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran (Rp)	SUB KEGIATAN		Anggaran (Rp)
Uraian	Indikator Kinerja			Uraian	Indikator Kinerja Outcome		Uraian	Indikator Kinerja Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam penanggulan Kebakaran dan penyelamatan	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran	94%	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen Pengkajian risiko pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran tepat waktu	76.056.540	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	37.428.016
							Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan penilaian sarana peralatan proteksi kebakaran	38.628.524
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Aparatur pemadam kebakaran dan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam Dunia Masyarakat dan Dunia Usaha	184.353.440	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat dan dunia usaha yang mendapat sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	135.510.752
							Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah pembinaan relawan pemadam kebakaran dan penyelamatan	48.842.688

Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		40.372.792	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang profesional	21,442,438
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelamatan Kebakaran, Penyelamatan Non Kebakaran dan Penanganan Bahan Berbahaya/Beracun serta melaksanakan hubungan kerjasama antar daerah berbatasan terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan dukungan Sarana Prasarana yang mencukupi	2.691.448.562	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Kabupaten/Kota	2.681.491.873
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan Manusia		338.628.787	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah laporan layanan respon cepat (response time) operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	338.628.787

		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, identifikasi, verifikasi terkait pengaduan sarana dan prasarana	427.407.804	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	122590040
					Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah peralatan pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota	290.192.892
					Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		14.624.872
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		19.797.838	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran	19.797.838
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pemadam Kebakaran	99.366.728	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Sakip dan perencanaan anggaran Perangkat Daerah	66.366.932
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.999.796

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang akuntabel	5.167.063.087	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan yang valid	4.985.002.872
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		32.748.082
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		145.026,478
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4.285.655
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	133.190.383	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian dan perkantoran	7.573.986
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1.942.500
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		81.071.958
			Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan		8.274.939
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.997.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		5.250.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		26.080.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang sesuai ketentuan	503.961.798	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan aset SKPD	84.997.258
			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		73.000.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		287.858.940
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		58.105.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	308.786.825	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan aset SKPD	65.350.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		45.082.369
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.110.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		188.009.256
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.235.200

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.351.600	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.516.000
					Pengadaan Mebel	16.983.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.278.600
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.574.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.999.771	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.999.771

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buleleng

2.7. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Perubahannya. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran	94%
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%

NO	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.080.750.482
2	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.444.720.031
Jumlah		10.525.470.513

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buleleng Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 3.1

Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran

	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat
--	---	----------------------------

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buleleng Tahun 2023

Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2023 (APBD Kabupaten), Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2022-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng tentang IKU Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng yang menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Nomor : 900/ 118 / I /Damkar/2023, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai tahun pertama renstra menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023			Ket
			Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	9
1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	%	94	100	100	
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	%	86	100	100	
Rata-Rata Capaian IKU					100	

Keterangan : pengukuran dilakukan di triwulan 4

Rata-rata Capaian IKU Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2021 sebesar 100% atau Sesuai Target. Kedua indikator yang tertuang dalam IKU secara umum mengalami keberhasilan ditandai dengan tercapainya 2 indikator yang sesuai target.

Keberhasilan tersebut berdasarkan capaian kinerja yang sesuai target ditunjukkan pada 2 (dua) indikator yaitu :

- 1) Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 100%.
- 2) Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas 100%.

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran	94%	100%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	100%	100%

Realisasi dan Pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Urusan	Capaian IKU
Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran	$\frac{\text{Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran dalam WMK}} \times 100\%$
Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		
			Targert	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	94%	100%	100%	100%

2.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	84%	100%	100%	100%
----	---	-----	------	------	------

Analisis Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Target Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran di Kabupaten pada tahun 2023 adalah 100%. Dapat dijelaskan target tersebut keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari hal-hal penunjang/faktor pendorong, penghambat/kendala, namun demikian beberapa kendala yang muncul telah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi pemecahannya sehingga didalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan

Tabel . 3.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Kriteria Penilaian Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran	94%	100%	100%	100%	Sesuai target

Sasaran 2 :

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik diwajibkan meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan public yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional adalah diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Untuk maksud tersebut, dilaksanakan penyusunan IKM dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng berdasarkan ketentuan dibawah ini :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 35 :
 - a. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan public dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal
 - b. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan public dilakukan melalui:
 - 1) Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
 - 2) Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang undangana.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Public.

Gambaran Kejadian Kebakaran di Wilayah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.4
Data Kasus/Kejadian Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng
Tahun 2017 s/d 2023

No	Kecamatan	Kasus/Kejadian							Kerugian Material (Rp)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sawan	8	8	24	27	19	10	26	50.000.000	-	36.000.000	555.000.000	1.100.000.000	5.950.000.000	8.083.400.000
2	Kubutambahan	-	19	37	38	35	8	27	-	1.500.200.000	100.500.000	4.000.000	2.000.000	190.500.000	1850.360.000
3	Sukasada	-	9	16	4	5	3	17	-	175.000.000	15.000.000	70.000.000	67.000.000	51.500.000	799.425.000
4	Buleleng	30	52	61	30	27	26	58	150.500.000	783.200.000	3.316.129.828	87.200.000	775.000.000	1.332.640.000	7.412.869.828
5	Banjar	4	13	9	6	13	5	12	-	300.000.000	1.680.000.000	150.000.000	82.000.000	1.982.000.000	4.772.500.000
6	Seririt	8	18	17	14	20	11	16	15.000.000	300.000.000	2.072.000.000	137.000.000	128.950.000	524.000.000	4.062.070.000
7	Busung Bui	-	6	3	1	2	1	-	-	10.000.000	50.000.000	-	300.000.000	150.000.000	510.000.000
8	Tejakula	2	2	5	8	2	6	13	-	-	-	-	-	1.100.000.000	1.170.000.000
9	Gerokgak	4	4	10	7	5	6	11	-	115.000.000	1.375.000.000	1.500.000	200.200.000	175.000.000	2.341.700.000
Total		73	154	182	133	128	76	180	215.500.000	3.183.400.000	8.644.629.828	1.004.700.000	2.655.150.000	11.455.640.000	31.002.324.828

Sumber : Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Tahun 2023

Berdasarkan tabel data kejadian diatas sepanjang tahun 2023 peristiwa kebakaran terjadi 180 kasus kebakaran di Kabupaten Buleleng, dengan total kerugian material Rp 31.002.324.828 dan NIHIL korban Jiwa maupun Luka-luka, sedangkan untuk kasus kebakaran yang terjadi di luar WMK sebanyak 39 kasus dengan tingkat waktu tanggap (Respon Time) 20 menit dan untuk kasus kebakaran dalam WMK tertangani 15 menit sebanyak 141 kasus kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (Respon Time) 15 Menit serta NIHIL kasus kebakaran di dalam WMK yang tidak tertangani selama 15 menit.

Tabel 3.5
Data Operasi Darurat Non Kebakaran
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng
Bulan Januari s/d Bulan Desember
Tahun 2023

No	Kecamatan	JENIS EVAKUASI											Jml	Ket	
		BINATANG					MANUSIA					Pohon Tumbang			Lainya
		Ular	Biawak	Anjing	Sarang Tawan	Lainnya	Potong Cincin	Manusia Hanyut	Jatuh	Lainnya					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	GEROKGAK				1								1		
2	SERIRIT	2	2		4		7						15		
3	BUSUNGBIU	1											1		
4	BANJAR	3			2	1							6	Kucing	
5	SUKASADA	18	2		7	1	1						29	Kucing	
6	BULELENG	59	7	3	21	2	32					1	127	Tabung gas bocor, Pelepasan kaleng yang tersangkut pada jari anak, burung hantu, pelepasan borgol, tokek	
7	SAWAN	4			3					2			8	Evakuasi korban kejepit dalam mobil	
8	KUBUTAMBAHAN	2		1						1			4		
9	TEJAKULA				2		1						2		
JUMLAH		89	11	4	40	4	41	0	0	3	0	1	193		

Sumber : Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Tahun 2023

Berdasarkan table Data Operasi Darurat Non Kebakaran, jumlah operasi Non Kebakaran di Kabupaten Buleleng dari Bulan Januari s/d Bulan Desember Tahun 2023 sebanyak 193 kejadian Non Kebakaran, adapun jenis – jenis kejadian di bagi menjadi 4 bagian yaitu :

1. Evakuasi Binatang
2. Evakuasi Manusia
3. Evakuasi Pohon Tumbang
4. Evakuasi jenis lainnya

Jenis Evakuasi paling banyak adalah jenis evakuasi ular yang berjumlah 89 penanganan, evakuasi sarang tawon 40 penanganan, evakuasi anjing 4 penanganan, evakuasi biawak 11 penanganan, potong cincin 41 penanganan. Adapun jenis evakuasi lainnya adalah seperti evakuasi kucing, tanah longsor, penanganan banjir, evakuasi monyet dll.

Tabel . 3.6

Skala Nilai Peringkat Kinerja Tingkat Waktu Tanggap Response Time Rate daerah layanan WMK Kebakaran di Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	2023			Kriteria Penilaian Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran	100%	94%	100%	100%	Sesuai Target
2	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	84%	100%	100%	

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022.

Realisasi anggaran/keuangan Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi keuangan		Fisik (%)	Capaian (%)
			(Rp)	(%)		
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.444.720.031	6.124.531.071	95.03	100	97.28
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	99.366.728	97.784.118	98.41	100	99.20
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.366.932	65.358.107	98.48	100	99.24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.999.796	32.426.011	98.26	100	99.13

2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.167.063.087	4.969.865.975	96.18	100	98.09
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.985.002.872	4.789.839.394	96.06	100	98.04
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.748.082	32.073.556	97.94	100	98.97
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	145.026.478	144.097.675	99.36	100	99.68
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.285.655	3.855.350	89.96	100	94.98
3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	133.190.383	116.583.655	87.83	100	93.77
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.573.986	7.223.000	95.37	100	97.68
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.942.500	1.790.000	92.15	100	96.07
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.071.958	71.176.755	87.79	100	93.90
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	8.274.939	5.593.000	67.59	100	83.79
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.997.000	2.250.000	75.08	100	87.54
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.250.000	3.704.000	70.53	100	85.28
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.080.000	24.846.900	95.27	100	97.64
4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	503.961.798	475.164.397	94.29	100	97.14
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.997.258	84.516.143	99.43	100	99.72
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	73.000.000	54.237.838	74.30	100	87.15
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287.858.940	282.007.032	97.97	100	98.98
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.105.600	54.403.384	93.63	100	96.81
5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	308.786.825	242.463.111	78.52	96.19	87.36
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.350.000	4.352.400	6.66	80.95	43.81
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.082.369	42.758.200	94.84	100	97.42
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.255.500	20.946.000	94.12	100	97.06
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.110.000	555.000	50.00	100	75.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.009.256	186.167.511	99.02	100	99.51
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.235.200	8.630.000	93.45	100	96.72
II	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.080.750.482	4.050.789.627	99.27	100	99.63
1	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.430.306.737	3.414.396.526	99,54	100	99.77
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota	2.681.491.873	2.679.547.352	99.93	100	99.96
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.956.689	9.467.400	95.09	100	97.54
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	271.077.579	269.585.435	99.45	100	99.72
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	122.590.040	11.9634.675	97.59	100	98.79
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	40.372.792	33.516.700	83.02	100	91.52
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan	290.192.892	289.037.464	99.60	100	99.80

	Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)					
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	14.624.872	13.607.500	93.04	100	96.52
2	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	76.056.540	74.642.337	98.14	100	99.07
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	37.428.016	36.853.106	98.46	100	99.23
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	38.628.524	74.602.865	97.83	100	98.91
3	<i>Investigasi Kejadian Kebakaran</i>	31.607.140	31.051.981	98.24	100	99.12
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	31.607.140	31.051.981	98.24	100	99.12
4	<i>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</i>	184.353.440	176.039.124	95.49	100	97.75
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	135.510.752	128.672.943	94.95	100	97.48
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	48.842.688	47.366.181	96.98	100	98.49
5	<i>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan Manusia</i>	358.426.625	354.659.659	98.95	100	99.47
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	338.628.787	335.279.534	99.01	100	99.51
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	19.797.838	19.380.125	97.89	100	98.95
TOTAL		10.525.470.513	10.175.320.698	96.67	99.76	98.22

Urusan Wajib Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng yaitu : Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pada tahun anggaran 2023 telah dialokasikan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 10.525.470.513,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.175.320.698,- (96.67%).

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Wajib sebagai berikut :

a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.080.750.482,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.050.789.627,- (82.51%).

Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, terdapat Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran

Dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.3.430.306.737 dan terealisasi sebesar Rp. 3.414.396.526,- (95.54%).

2. Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, alokasi anggaran sebesar Rp.76.056.540,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.642.337,- (98.14%).
3. Terlaksananya Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran alokasi anggaran sebesar Rp.31.607.140,- dan terealisasi sebesar Rp.31.051.981,- (98.24%)
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran alokasi anggaran sebesar Rp.184.353.440,- dan terealisasi sebesar Rp. 176.039.124,- (95.49%).
5. Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan Manusia alokasi anggaran sebesar Rp.365.079.295,- dan terealisasi sebesar Rp. 358.426.625,- (98.95%).

Sedangkan Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.444.720.031,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.124.531.071,- (95.03%).

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja alokasi anggaran sebesar Rp. 99.366.728,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.784.118,- (98.41%)
2. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 5.167.063.087,-, terealisasi sebesar Rp. 4.969.865.975 (96.18%)
3. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.190.383,- dan terealisasi sebesar Rp.116.583.655,- (87.53%) di sebabkan karena harga pasar lebih rendah dari harga di DPA.
4. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 503.961.798,- dan terealisasi sebesar Rp. 475.164.397,- (94.29%).
5. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi anggaran Rp. 308.786.825 dan terealisasi Rp. 242.463.111 (78.52%) di sebabkan karena masih mengurus ijin/pajak kendaraan yang hilang
6. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah alokasi anggaran Rp. 39.999.771 dan terealisasi Rp. 39.356.335 (98.39%)
7. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah alokasi anggaran Rp. 32.999.839 dan terealisasi Rp. 32.348.986 (98.03%).

8. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran Rp. 159.351.600 dan terealisasi Rp. 150.964.494 (94.74%).

Realisasi anggaran/keuangan Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi keuangan		Fisik (%)	Capaian (%)
			(Rp)	(%)		
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.716.664.015	5.569.549.675	97.43	100	98.71
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	104.807.827	103.213.029	99.04	100	99.24
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.329.877	71.635.651	99.04	100	99.52
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.477.950	31.577.378	97.23	100	98.61
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.600.430.279	4.512.144.829	98.08	100	99.04
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.342.368.012	4.271.506.543	98.37	100	99.18
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.925.575	59.242.537	80.14	100	90.07
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	179.507.022	177.675.424	98.98	100	99.49
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.629.670	3.720.325	80.36	100	90.18
3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	179.287.577	160.854.967	80.72	100	94.36
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.441.665	3.291.372	74.10	100	87.05
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.057.350	14.713.910	86.26	100	93.13
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.890.341	90.599.641	88.92	100	94.46
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	11.434.221	8.560.500	74.87	100	87.43
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	2.700.000	100	100	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	8.000.000	100	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.3764.000	32.989.544	97.71	100	98.85
4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-472.717.832	437.920.963	92.64	100	96.32
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.268.274	58.198.633	98.20	100	99.10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.000.000	60.380.863	82.71	100	91.36
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	279.428.950	260.904.288	93.37	100	96.69
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.020.608	58.437.179	95.77	100	97.88
5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	35.9420.500	355.415.887	98.89	100	99.44
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.850.000	4.704.600	80.42	100	90.21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	331.315.000	329.765.287	99.53	100	99.77
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.255.500	20.946.000	94.12	100	97.06
II	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.865.896.997	3.189.599.796	82.51	85.00	83.75

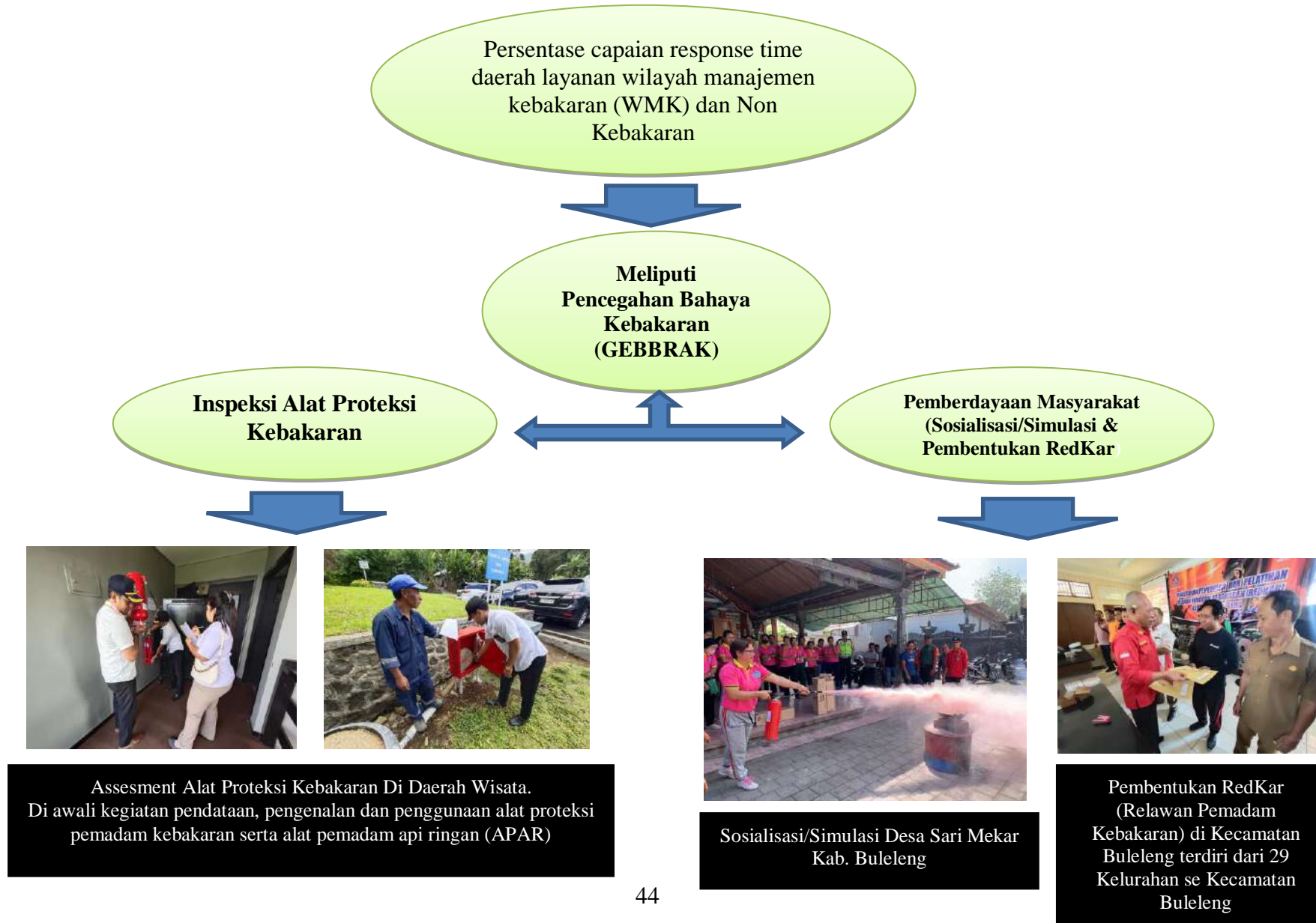
1	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.223.496.231	2.697.702.905	83.69	95.83	89.76
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota	2.710.330.772	2.251.200.625	83.06	91.67	87.36
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	180.606.800	165.587.025	91.68	100	95.84
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	21.442.438	20.655.859	96.33	100	98.17
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	311.116.221	260.259.396	83.65	91.67	97.66
2	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	100.215.069	83.739.559	83.56	91.67	87.61
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	11.594.500	9.136.694	78.80	91.67	85.23
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	88.620.569	74.602.865	84.18	91.67	87.92
3	<i>Investigasi Kejadian Kebakaran</i>	30.656.815	25.363.716	82.73	91.67	87.20
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	30.656.815	25.363.716	82.73	91.67	87.20
4	<i>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</i>	146.449.587	124.362.335	84.92	100	92.46
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	125.348.544	106.669.724	85.10	100	92.55
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	21.101.043	17.692.611	83.85	100	91.92
5	<i>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan Manusia</i>	365.079.295	349.739.085	95.80	100	97.90
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	324.077.005	309.656.985	95.55	100	97.78
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	41.002.290	40.082.100	97.76	100	98.88
TOTAL		9.582.561.012	9.383.760.904	97.93	100	98.96

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buleleng

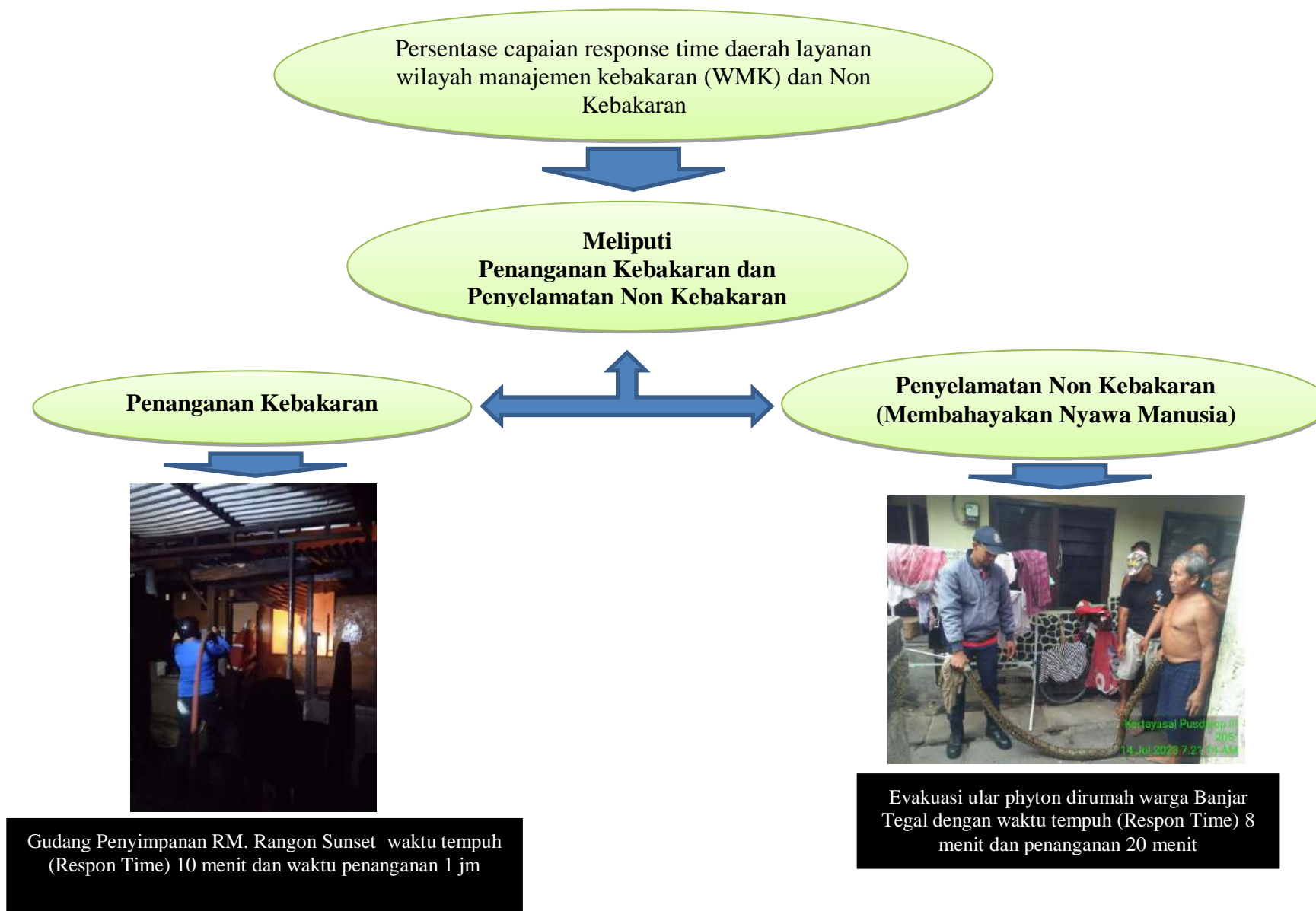
Pada Tahun Anggaran Tahun 2022 sebagai bahan perbandingan untuk Tahun Anggaran Tahun 2023. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak ada mengingat Pagu Anggaran yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran untuk Penanganan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di prioritaskan pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

4.3. PEMANTAUAN RENCANA AKSI DALAM BENTUK KERJA NYATA

GAMBAR 3.1



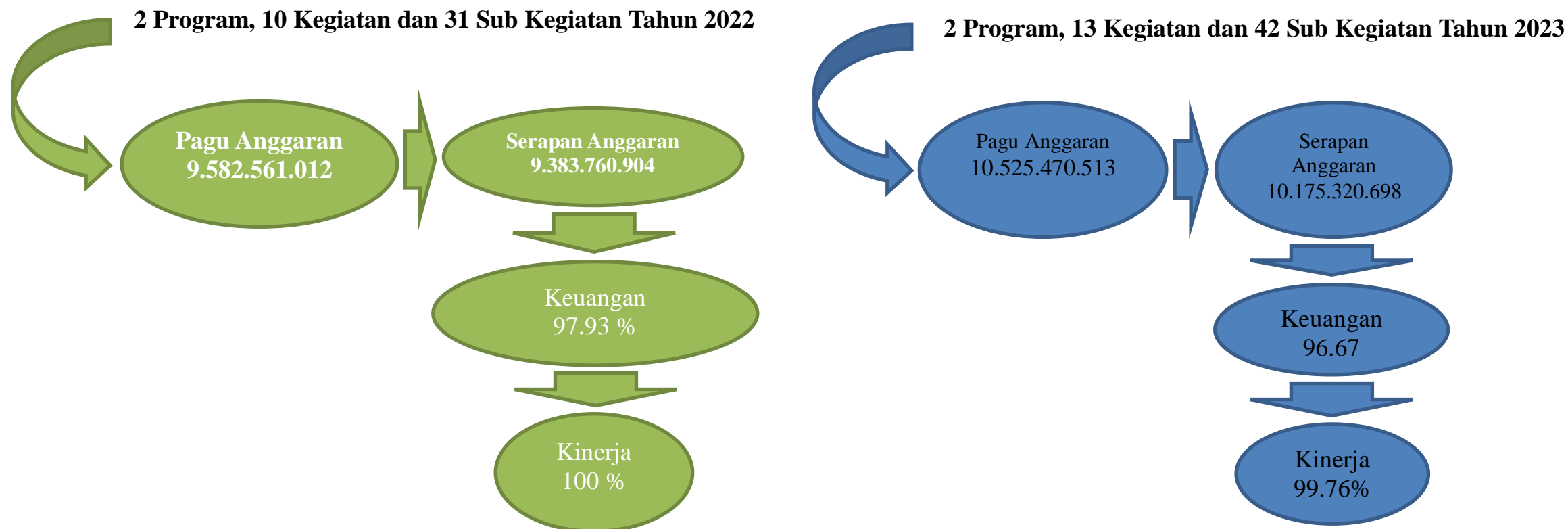
GAMBAR 3.2



4.4. DATA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BULELENG

GAMBAR 3.3

Data Kinerja dan Realisasi Anggaran
Tahun 2022 dan 2023



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 (Induk dan Perubahan), sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng selama Tahun Anggaran 2023. Hasil laporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah layanan WMK berdasarkan waktu tanggap penanganan kebakaran telah mencapai target 100% yang ditetapkan dengan predikat **sesuai target**.

Hambatan dan permasalahan yang muncul dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran antara lain sebagai berikut:

1. Kesulitan mengukur nilai kinerja dari indikator tolok ukur yang ditetapkan;
2. Alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pemadam kebakaran sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar belum menjadi skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
3. Dalam Pencapaian SPM Respon Time 15 menit belum terwujud karena kurangnya sarana prasarana penunjang
4. Dalam peningkatan kinerja ruang gerak pegawai di administrasi perkantoran masih belum tercukupi kapasitas ruang dalam bangunan perkantoran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK);
3. Harus terbentuknya Kapos dan Sub Sektor, Relawan Damkar dan Armada serta sarana penunjang lainnya
4. Diadakan rehabilitasi dan pengembangan fisik bangunan kantor untuk menunjang kenyamanan kerja

Demikian laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 ini semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang akan datang, serta kebijakan yang diperlukan.

Singaraja, 29 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupateng Buleleng



Putu Ariadi Pribadi, S.STP.M. AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19801212 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax:(0362-3301559)
Email: inspektorat@bulelengkab.go.id
Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : 700.1.2.7/331/Itda/2024
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Singaraja, 12 Februari 2024
Kepada:
Yth. Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran Kabupaten
Buleleng
di -
Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng No. 800.1.11.1/019/Itda/2024 tanggal 16 Januari 2024 dalam rangka melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Adapun predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Predikat	Interpretasi
CC Nilai >50 – 60 Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D Nilai >0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Evaluasi atas capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	14,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69,75
Kategori			B

Nilai **69,75** dengan kategori **B** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng sudah **baik**, namun masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

4. Hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. **Komponen Perencanaan Kinerja**

1) **Kualitas Perencanaan Kinerja:**

- a) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan. Penjenjangan kinerja dari level pimpinan sampai dengan level individu belum seluruhnya mengacu pada diagram cascading.
- b) Belum ada diagram crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

2) **Pemanfaatan Perencanaan Kinerja:**

Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.

b. **Komponen Pengukuran Kinerja**

1) **Kualitas Pengukuran Kinerja:**

- a) Belum menggunakan media berbasis elektronik dalam mengumpulkan dan mengukur kinerja.
- b) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

2) **Pemanfaatan Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

c. **Komponen Pelaporan Kinerja**

1) **Kualitas Pelaporan Kinerja**

- a) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
- b) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

2) Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja telah memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sepenuhnya sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan, dan kegiatan.

d. Evaluasi Kinerja

1) Kualitas Evaluasi

- a) Evaluasi kinerja triwulanan sudah dilakukan namun belum memuat faktor pendorong atau penghambat tercapainya kinerja.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Intern belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

2) Pemanfaatan Evaluasi.

Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya ditindaklanjuti

5. Rekomendasi

Sehubungan dengan belum memadainya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng agar:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1) Melakukan penjenjangan kinerja dari level pimpinan (eselon II) sampai dengan level individu yang mengacu pada diagram cascading.
- 2) Membuat diagram crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- 1) SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Buleleng No 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja serta kedepan dalam melakukan monev pengukuran kinerja triwulanan tetap berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan.
- 2) Kedepan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural

maupun fungsional.

c. **Komponen Pelaporan Kinerja**

Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

d. **Evaluasi Kinerja**

- 1) Evaluasi kinerja triwulanan secara berjenjang dari program sampai dengan sub kegiatan agar memuat faktor pendorong atau penghambat tercapainya kinerja.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Intern agar dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).
- 3) Menindaklanjuti seluruh Hasil Evaluasi AKIP tahun 2023.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



Putu Karuna, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip